

PENGARUH DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Syahrudin Hudani ^{1*}

syahrudin1005@icloud.com ^{1*}

^{1*} Universitas Tomakak, Mamuju

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan *simple random sampling*, pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi yaitu 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang diolah adalah dana bagi hasil dan belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yakni observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan Statistic Product and Service Solution (SPSS 22) menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yang mengindikasikan bahwa Besar kecilnya Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan oleh Dana Bagi Hasil

Kata Kunci: *Dana Bagi Hasil; Belanja Daerah*

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman, baik dari segi karakteristik masing-masing daerah maupun potensi sumber daya yang beragam. Dilihat dari perubahan dan kemajuan yang baik di daerah-daerah di Indonesia, banyak pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan pariwisata dan tata kota. Otonomi daerah adalah daerah yang mengatur dirinya sendiri. Dasar pelaksanaan otonomi daerah adalah UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah dari UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, pengaturan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mali, Melchiare Sarta & Tahir, 2021). Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU No. 33 Tahun 2004 memandang bahwa pelaksanaan otonomi daerah didukung melalui penyediaan sumber pembiayaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari PAD dan Dana Perimbangan. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, dimana belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai kumpulan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.

Proses penyusunan APBD seringkali dihadapi oleh berbagai tantangan, termasuk fluktuasi pendapatan dan dinamika belanja daerah. Seperti pada salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Bone. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2023 mengalami penurunan APBD Tahun 2023, dari Rp. 2,5 Triliun menjadi Rp. 2,1 Triliun, turun sekitar 400 Miliar. Hal ini disampaikan Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Drs. Andi Islamuddin. Menurunnya APBD Tahun 2023 disebabkan Pemerintah Daerah tidak lagi mendapatkan Dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) juga tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID). Prioritas APBD Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022. Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023. Seperti pemenuhan mandatoris pending, pemenuhan standar pelayanan dan penganggaran penanganan dampak pasca covid 19, serta penanganan dampak inflasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (sumber: rri.co.id). Seperti yang terlihat dari fenomena penurunan APBD, implementasi otonomi daerah tidak selalu berjalan mulus. Penurunan anggaran menjadi tantangan serius yang perlu diatasi, memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab dan upaya pemulihan yang efektif. Di tengah dinamika ini, pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan antara upaya pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kesadaran akan peran penting masyarakat dalam otonomi daerah menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan ekonomi serta kebutuhan lokal. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan potensi positif dari implementasi otonomi daerah.

Otonomi daerah menekankan peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang diupayakan untuk ditingkatkan. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan pelaksanaan desentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, memungut pendapatan daerah dan mengalokasikan dana untuk pelayanan publik, serta sebagai kewenangan dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Wulandari, 2014).

Pendapatan daerah juga berasal dari perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan APBN. Sumber pendapatan daerah dalam struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi, dimana PAD dapat dikatakan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan dan pengeluaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimaksudkan untuk dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Menurut struktur APBD, dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan lain- lain pendapatan daerah bertujuan memberikan peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbangan yang terdiri dari hibah dan dana darurat.

Salah satu bagian terpenting dari APBD adalah belanja daerah. Dalam era desentralisasi fiskal saat ini, melalui belanja daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor, khususnya sektor publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melayani masyarakat selama satu tahun anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Belanja daerah memiliki pengertian semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004). Hal ini sejalan dengan dengan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yang mendasari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan antara *agency theory* dalam penelitian dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyaluran Dana Bagi Hasil dan juga hubungan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah pusat memberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur (2023) "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Melalui Kinerja Keuangan Pada Pemerintah kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan" yang menjadi acuan dalam penelitian ini menggunakan populasi di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode Analisis

Penelitian Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan periode 2020-2022. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sedangkan sumberdata yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan periode2020-2022 yang berjumlah 24 Kabupaten/Kota. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 24 Kabupaten/Kota.

Hasil

Hasil Uji Statistik Deskriptif

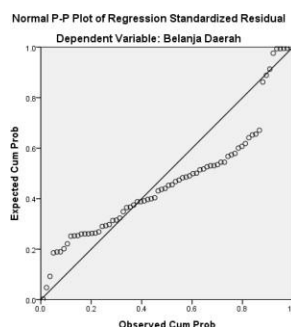
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah	72	550.00	3550.06	1359.5222	520.44057
Dana Bagi Hasil	72	14.33	331.74	39.3621	47.42287
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Hasil Olahan SPSS

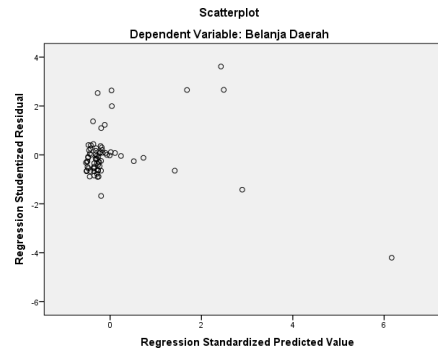
Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa hasil statistic deskriptif tentang variabel-variabel dalam penelitian ini antara lain:

- Nilai minimum Belanja Daerah (Y) sebesar Rp. 550 Milyar, nilai maximum sebesar Rp. 3.550.06 Milyar dan nilai rata-rata sebesar Rp. 1.359 Milyar dan Standar deviasi Sebesar 520.44057
- Nilai minimum Dana Bagi Hasil (X) sebesar Rp. 14.33 Milyar, nilai maximum sebesar Rp. 331.74 Milyar dan nilai rata-rata sebesar Rp. 39.3621 Milyar dan Standar deviasi Sebesar 47.42287.



Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot

Berdasarkan gambar grafik normal p-p plot dapat dilihat bahwa sebaran data mengikuti garis diagonal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 2. Uji Heterokedastistas

Berdasarkan gambar 2 grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterosekedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi Belanja Daerah dengan variable yang mempengaruhi yaitu Dana Bagi Hasil.

Tabel 2. Model Persamaan Regresi

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1145.158	69.895			16.384	.000
	Dana Bagi Hasil	5.446	1.139	.496		4.782	.000

Sumber Data: Diolah 2026

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = 1145.158 + 5.446 X$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta adalah 1145.158 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen Dana Bagi Hasil bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (Belanja Daerah) sebesar Rp. 1145.158 Milyar.
- Koefisien regresi Dana Bagi Hasil (bx) adalah 5.446 dan bertanda positif. Hal ini berarti setiap peningkatan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 1 Milyar

dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menyebabkan Belanja Daerah (Y) mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.446 Milyar.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.496 ^a	.246	.235	455.05499
a. Predictors: (Constant), Dana Bagi Hasil				
b. Dependent Variable: Belanja Daerah				

Sumber Data: Diolah 2026

Dari tabel 4 di atas dapat kita lihat nilai R sebesar 0,496 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Belanja Daerah dengan Dana Bagi Hasil kurang. Sedangkan nilai R square sebesar 0,246 atau 24,60%, ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Dana Bagi Hasil sebesar 24,60% sedangkan sisanya sebesar 75,40% dapat dijelaskan oleh variabel lain. Berdasarkan table 3 dapat dilihat bahwa nilai sig variabel Dana Bagi Hasil sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan diterima.

Pembahasan

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Y). Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil yang tinggi mampu meningkatkan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, atau dengan kata lain peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan alokasi anggarannya, baik untuk belanja operasional, public, maupun belanja modal guna mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Temuan ini didukung oleh teori keagenan dimana keterkaitan hubungan *principal* dan *agent* terlihat ketika menyalurkan Dana Bagi Hasil yang berkaitan dengan pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengelola rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari pemberian wewenang tersebut, pemerintah pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil yang bertujuan membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintah sehari-hari maupun dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, teori *agency* juga berkaitan dengan hubungan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*). Masyarakat sebagai *principal* telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi daerah dan lain sebagainya yang

dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017) menemukan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Titi Rizkyana Sri Rahayu (2021) menemukan secara parsial Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Provinsi di Indonesia tahun 2020.

Simpulan dan Saran

Uraian analisa dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan Dana Bagi Hasil mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggarannya, baik untuk belanja operasional, public, maupun belanja modal guna mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, maka penulis memberikan saran yaitu pemerintah senantiasa meningkatkan penerimaan Dana Bagi Hasil dan sumber penerimaan yang lain misalnya Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Daftar Pustaka

- Adiyanti, A. D. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 -2021. Skripsi.
- Apriliawati, K. N. (2016). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. 5.
- Destiningsih, R. (2019). Fenomena *Flaypaper Effect* Pada Pad, Dau, Dan Dbh Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Di Pulau Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Dinamic: Directory Journal Of Economic*, 1 (4). 479-494.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada 14 Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *Jshp (Jurnal Sosial Humanior Dan Pendidikan)*, 1(1), 43. <https://doi.org/10.32487/Jshp.V1i1.234>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197-214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana

- Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Inovasi*, 14(10), 44. <https://doi.org/10.29264/Jinv.V14i1.3546>
- Fernandes, J., & Fauzia, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Revenue: Jurnal ilmiah Akuntansi*, 3(1), 187-197. <https://doi.org/10.46306/Rev.V3i1.101>
- Isramiwati, R., Rusli, & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau tahun 2011 S.D 2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195-213
- Islam, S. I., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 7(2), 639. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.507>
- Istiqamah, N., Arif, M., Maknun, M., Mapparenta, M., & Awaluddin, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. *Center of Economic Students Journal*, 5(1), 50-56. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i1.86>
- Malau, Y. N., Lase, W. L., Clodia, V., Sagala, B., Ekonomi, F., Prima, U., & Utara, S. (2020). ISSN : 2337-3067 E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana 9 . 8 (2020): 709-728 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi , PAD , DAU Dan DBH Terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh 2013-2017 Pendahuluan Penetapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Peme. 8, 709-728.
- Mali, Melchiare Sarta, P., & Tahir, M. A. (2021). Pengaruh PAD , DAU , DAK , DBH terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota di Provinsi NTT tahun 2017-2019. *The 2nd Widyagama National Conference on Economics and Business (WNCEB 2021) Program, Wnceb*, 567-576.
- Munawir Chalil, T. (2018). *The Size Of Flypaper Effect In Decentralizing Indonesia*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, 2(2), 80-94. <https://doi.org/10.36574/Jpp.V2i2.37>
- Muhammad Nur , Abdul Rahman Mus , Mapparenta, A. N. (2022). The Effect of General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Regional Expenditure in Districts/Cities of South Sulawesi Provinceid 4 *Corresponding Author. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(6), 4173-4181. <http://journal.yrpioku.com/index.php/msej>